

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Revolusi Iran yang juga dikenal dengan sebutan Revolusi Islam disebut sebagai salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia<sup>1</sup>. Bagi banyak kalangan akademisi, revolusi Islam Iran pada tahun 1978-1979 merupakan contoh murni dari politik Islam, "fundamentalisme Islam". Revolusi itu mengangkat banyak isu yang berkaitan dengan Islam kontemporer keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik. Penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik dan keadilan sosial dan disertai pula dengan penolakan terhadap pengaruh Negara Barat, pemerintah otoritarian, pembagian kekayaan yang tidak merata dan tak kalah penting adalah pengaruh ideologi syi'ah dengan ulama sebagai poros pergerakan<sup>2</sup>.

Revolusi Iran berdampak pada perubahan sistem pemerintahan Negara Iran, pemerintahan monarki berubah menjadi pemerintahan berbentuk republik. Pemerintahan monarki Iran (Dinasti Pahlevi) yang dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlevi digantikan oleh pemerintahan republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini pada tahun 1979<sup>3</sup>. Perubahan kekuasaan ini di mulai pada bulan Januari 1978 yang ditandai dengan adanya demonstrasi besar pertama di seluruh wilayah Iran. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan menentang Dinasti Pahlevi dimana

---

<sup>1</sup> Richad W. Conttam, "Inside Revolutionary Iran", The Middle East Journal 43: 2 (musim semi 1989), hlm. 168

<sup>2</sup> Smith Alhadar, "Revolusi Iran dan Kiprah Khatami", "Pengantar", dalam Mohammad Katami, "Membangun Dialog Antar Peradaban: Harapan dan Tantangan", terj. Tim CIMM, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 17.

<sup>3</sup> "History of Iran: Islamic Revolution of 1979", dalam [http://www.iranchamber.com/history/islamic\\_revolution/islamic\\_revolution.php](http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/islamic_revolution.php), diakses pada februari 2011.

seluruh rakyat Iran turun kejalan melakukan demonstrasi-demonstrasi yang berkelanjutan dan diakhiri dengan lumpuhnya Iran pada 1 Februari 1979, dengan adanya pernyataan dari pihak angkatan bersenjata Iran (pendukung dinasti Pahlevi) bahwa mereka berada pada posisi netral karena kalah oleh para gerilyawan dalam perang jalanan. Hal ini juga ditandai dengan kembalinya Khomaeni ke kota Teheran (setelah diasingkan ke Perancis) yang disambut gembira jutaan warga Iran. Perlawanan ini ditutup dengan konstitusi teokrasi baru dimana Ayatullah Khomeini diangkat menjadi pemimpin Republik Islam Iran dan secara resmi dilakukan pada tanggal 1 April 1979 melalui referendum nasional dimana sebagian warga Iran menyetujuinya.

Iran dibawah Khomeni menjadi suatu paradigma baru bagi Islam revolusioner sehingga potensi penyebaran dan ancamannya dikhawatirkan oleh banyak pemerintahan di dunia Muslim dan dunia Barat. Seruan Marg Bang Amerika, "Mampuslah Amerika", terus bergema dari waktu ke waktu. Iran menjadi titik acuan utama atau contoh bagi mereka yang hendak membicarakan hakekat dan acaman "fundamentalisme Islam" dengan kaitannya dengan isu-isu yang berkisar dengan Islam dan revolusi hingga Islam demokrasi<sup>4</sup>.

Dinasti Pahlevi telah hancur menghadapi "revolusi Islam" yang menjanjikan partisipasi politik yang lebih besar, mempertahankan identitas dan kemerdekaan nasional, dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan sosial. Republik Islam Iran adalah sebuah Negara modern yang memberikan pengakuan dan tempat yang layak bagi warisan dan identitas relegio-kultural Iran.

---

<sup>4</sup> Juan R.I Cole dan Nikki R. Keddie, peny, "*Shiism and social Protest*", (New Haven: Yale University Press, 1986), dan Martin Kramer, peny., "*Shiism, Resistance, and Revolution*" (Boulder, Colo: Westview 1987).

Hingga menjelang pertengahan 1990-an Republik Islam Iran tetap menjadi lambang penting bagi Islam revolusioner, setelah berlangsung lebih dari setengah dasawarsa, pengalaman dari Iran dapat dijadikan studi kasus mengenai politik Islam modern dalam praktiknya. Jelas bahwa Iran mewakili eksperimen penting dalam upaya menciptakan Negara agama yang modern. Struktur yang dibangunnya tidak sama dengan pola-pola praktik demokrasi sebagaimana dikembangkan dalam masyarakat Barat. Sistem politik Iran merupakan perpaduan antara aturan otoriter dan partisipasi politik rakyat yang penuh perdebatan dengan cara yang mencerminkan isu penting menyangkut hubungan Islam dan demokrasi.

Iran merupakan negara yang menentang kepemimpinan yang otoriter, bahkan terhadap kepemimpinan sebelum masa revolusi. Selain itu, Iran juga menentang negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan Israel. Namun kebijakan berbeda diterapkan Iran terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh rezim Bashar al Assad di Suriah. Iran memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan tersebut. Sejarah merupakan salah satu faktornya, seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan Arab dan Afrika, Hossein Amir-Abdollahian,

*“Kami memiliki hubungan strategis dengan Suriah, yang kita pandang sebagai negara penting dalam sumbu perlawanan. Ikatan sejarah kami dengan rakyat dan pemerintah Suriah, memberikan kita wawasan yang baik tentang budaya rakyat disana, yang, karena perlawanan mereka melawan dominasi AS-Israel, mereka memiliki rasa persatuan nasional bersama. Berkenaan dengan apa yang diklaim oleh beberapa pihak, kita tidak perlu mengirim senjata ke Suriah. Kita hanya mengartikulasikan dukungan kita kepada rakyat Suriah dan reformasi Presiden Bashar al-Assad.”<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> “Iran Akan Hentikan As Dalam Manipulasi Krisis di Suriah”, dalam <http://islamtimes.org/vdcjhievaugexvz.bnfu.html>, diakses pada 12 Februari 2013.

Kondisi konflik di Suriah (Syria) mulai menunjukkan peningkatan dan semakin mengkhawatirkan. Para aktivis oposisi Suriah mengatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, militer dan kelompok preman yang pro-pemerintah telah menangkap sejumlah warga sipil di Homs. Pusat kota dihancurkan, kaum pria, wanita dan bahkan anak-anak diserang, kemudian mereka ditembaki dan dibunuh. Dalam penyerangan tersebut kelompok oposisi menyebutnya sebagai pembantaian dan memperkirakan 47 hingga 53 warga telah tewas. Pemerintah yang berkuasa mengakui adanya korban tewas dan menyebut mereka sebagai “kelompok teroris yang bersenjata”. Sejak terjadinya gelombang reformasi di Arab yang diawali dari Tunisia, reformasi mencapai Suriah pada bulan Maret 2011, dimana ketika penduduk kota kecil di selatan turun ke jalan untuk memprotes penyiksaan terhadap mahasiswa. Pemerintah menangani demo tersebut dengan kekerasan. Presiden Bashar al Assad sebagai pewaris pemerintahan diktator ayahnya Hafez al Assad kemudian mengirimkan senjata berat dan tank untuk menindas pemrotes. Dalam perkembangannya, pada bulan Desember 2011, ribuan tentara kemudian membelot dan mulai melancarkan serangan terhadap pemerintah<sup>6</sup>. Di kalangan elite rezim Bashar al-Assad saat ini dikenal ada dua kubu dalam menghadapi krisis di negara itu. Pertama, kubu garis keras yang memilih menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi aksi unjuk rasa rakyat yang menuntut lengsernya rezim keluarga Assad. Dalam kubu ini terdapat Presiden Bashar al-Assad; Komandan Pasukan Elite divisi IV Jenderal Maher al-Assad, yang juga adik bungsu Bashar; dan Ketua Intelijen Ali Mamluk. Kedua, kubu moderat yang menghendaki agar penanganan solusi krisis Suriah

---

<sup>6</sup> Ramelan, *Mengapa Amerika tidak Menerang Suriah*, 2012. dalam <http://bankam.kompasiana.com/2012/03/14/mengapa-amerika-tidak-menyenang-suriah-446772.html>, diakses pada 13 Februari 2013.

meniru model solusi Yaman seperti yang diminta Liga Arab. Model solusi Yaman adalah presiden menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden dengan imbalan perlindungan hukum atas presiden yang legowo lengser. Dalam kubu moderat di antaranya terdapat Wakil Presiden Farouk Shara dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Baath yang berkuasa di Suriah, Abdullah Al Ahmar. Kebijakan kubu garis keras yang dipimpin Bashar al-Assad adalah kebijakan yang diadopsi Pemerintah Suriah saat ini. Akibatnya, krisis Suriah semakin berdarah dan telah menelan korban tewas sekitar 27.000 jiwa.<sup>7</sup>

PBB menilai Suriah diambang perang saudara. Pemerintahan oposisi di pengasingan kemudian dibentuk, diberi nama Dewan Nasional Suriah. Internal Dewan yang tidak terlalu kuat akhirnya terpecah berdasarkan garis ideologis, etnis atau sektarian. Pada dasarnya semuanya sepakat untuk menggulingkan pemerintah Presiden Assad. Para pengikut Assad, sebagian besar elit khususnya militer, berasal dari sekte Alawit, yaitu kelompok minoritas di negara yang mayoritas adalah Sunni. Kekejaman pemerintahan Bashar al Assad menuai kecaman baik dari PBB, Amerika Serikat dan banyak negara lain di dunia. Para menteri luar negeri dari lebih 50 negara di Tunisia yang menghadiri pertemuan "Friends of Syria" mengutuk Presiden Bashar al-Assad dan mendesaknya untuk mengundurkan diri. "Friends of Syria" juga akan memberlakukan sanksi terhadap Suriah antara lain larangan perjalanan bagi para pejabat senior Suriah,

---

7. Patnistik, "Keluarga Al Assad Mulai Retak", 2012 dalam, <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/22/08342997/Keluarga.Al-Assad.Mulai.Retak>, diakses pada 13 Februari 2013

pembekuan aset mereka, pemboikotan minyak Suriah, penangguhan investasi dan pencegahan pasokan senjata kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Kebijakan Al-Assad terhadap para pemrotes dengan kekerasan menuai kecaman keras dari dunia internasional. Kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang bahkan warga sipil memicu konflik dan kerusuhan-kerusuhan di Suriah hingga saat ini. Langkah Assad yang meredam gejolak dengan senjata menuai protes seluruh negara di dunia, terutama Amerika Serikat. Kritik keras datang justru dari negara tetangga dekatnya, Yordania, Turki dan Liga Arab. Suriah dikeluarkan sebagai anggota Liga Arab setelah tetap melakukan kekerasan walau menyatakan menyetujui rencana perdamaian. Pada Februari 2012, Majelis Umum PBB dalam sidangnya menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi mengutuk Presiden Assad atas langkah kekerasan terhadap pemberontakan yang terjadi. Tercatat dua negara Rusia dan China sebagai pelindung tradisional Suriah menolak serta semua langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Iran menjadi negara penting untuk berperan menyelesaikan konflik disamping Rusia, dimana Iran sangat prihatin, karena terdapat satu juta Muslim Syiah di Suriah yang kemungkinan akan menjadi korban apabila terjadi perang saudara. Kejatuhan Assad diperkirakan akan menyebabkan pertumpahan darah yang lebih besar. Iran jelas pada posisi sulit, berada di jalan buntu, tidak dapat meninggalkan Assad, tetapi juga tidak dapat menyelamatkannya. Korban yang akan jatuh dikalangan Syiah diperkirakan akan besar pada negara dengan berpenduduk mayoritas Sunni itu. Konflik hanya akan selesai apabila Amerika, negara

---

8. Ramelan, 2012 dalam <http://hankam.kompasiana.com/2012/03/14/mengapa-amerika-tidak-menyerang-suriah-446772.html>, diakses pada 13 Februari 2013

Barat lainnya, Rusia dan Iran bersama-sama mengelola kejatuhan Assad, sekaligus menetralsir kemungkinan meluasnya konflik ke negara tetangga Suriah.<sup>9</sup>

Iran adalah sekutu regional utama pemerintah Suriah dalam konflik dengan kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Pada hari Senin, juru bicara Keamanan Nasional dan Komisi Kebijakan Luar Negeri Majelis (Parlemen) Iran, Seyyed Hossein Naqavi-Hosseini, melalui Press TV mengatakan bahwa, situasi di Suriah mengambil giliran dalam mendukung bangsa dan pemerintah Suriah dan merugikan dari teroris dan kelompok oposisi bersenjata. Anggota parlemen Iran menambahkan bahwa rencana yang diusulkan oleh Assad untuk menyelesaikan masalah Suriah telah menciptakan iklim baru bagi masa depan negara Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast mengatakan bahwa Republik Iran mendukung pernyataan Presiden Suriah dan rencana perdamaian yang diusulkannya. Dalam pidatonya Presiden Suriah Bashar al-Assad menyajikan apa yang ia digambarkan sebagai rencana perdamaian baru untuk mengakhiri krisis di Suriah, langkah yang telah diberhentikan oleh lawan-lawannya sebagai taktik untuk menjatuhkannya pada kekuasaan. Dia menawarkan sebuah konferensi rekonsiliasi nasional, pemilu dan konstitusi baru. Tapi ia juga menuntut agar negara-negara Barat harus terlebih dahulu berhenti membantu pejuang oposisi.<sup>10</sup>

Dukungan Iran terhadap pemerintahan Al Assad di Suriah dalam penyelesaian konflik negara tersebut merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena selain Iran merupakan satu-satunya negara dikawasan Timur Tengah dan Arab

---

9. Ramelan, 2012 *dalam* <http://politik.kompasiana.com/2012/08/10/konflik-suriah-sebuah-pelajaran-dalam-berbangsa-dan-bernegara-484775.html>, diakses pada 13 Februari 2013

10. Anonim, 2013 *dalam* <http://www.wartanews.com/timur-tengah/a79246a5-c984-5a24-ade0-ea85003140a1/iran-dukung-visi-politik-assad-demi-masa-depan-suriah-negara-arab>, diakses 13 Februari 2013.



yang mendukung pemerintahan Bashar Al Assad, Iran juga merupakan negara yang sering menentang pemerintahan dengan model otoritarianisme namun sikap Iran justru sebaliknya, bahkan memberikan dukungan penuh akan legitimasi pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah. Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk mempelajari lebih dalam mengenai latar belakang negara Iran membuat kebijakannya yang mendukung pemerintahan Bashar Al Assad tersebut.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah **“Apa kepentingan nasional negara Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah?”**

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional, merupakan sebuah tujuan yang dimiliki oleh negara sehingga menjadi acuan dalam melakukan setiap keputusan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Kepentingan sebuah negara akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh negara itu sendiri. Konsep Kepentingan Nasional sebenarnya dapat dikatakan ambigu, konsep ini tidak memiliki pengertian universal. Setiap Negara memiliki definisi berbeda mengenai Kepentingan Nasional masing-masing. Hal ini dikarenakan kepentingan yang dimiliki sebuah negara merupakan cerminan karakteristik dari pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Selain itu, Kepentingan Nasional dapat didefinisikan secara berbeda oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya



ekonomi, ideologi, power, kemandirian militer, dan sebagainya. Pemerintahan yang berkuasa memiliki peran yang besar dalam mendefinisikan Kepentingan Nasional suatu Negara.<sup>11</sup>

Teori Kepentingan Nasional ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan cara mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap bertahan.

Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sector industri dan sebagainya.<sup>12</sup>

*Kepentingan nasional (national interest) dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun bisa juga terjadi interplay antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru.<sup>13</sup>*

---

<sup>11</sup>Daniel S. Papp, "Contemporary International Relations: frameworks for understanding", (5th ed.; Viacom company, 1997), hlm. 43- 46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 29.

<sup>13</sup> Sumpena Prawira Saputra, "Politik Luar Negeri Indonesia", Remaja KaryaOffset, Jakarta, 1985, hal 24.

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai konsepsi yang sangat umum yang merupakan unsur timbulnya kebutuhan penting untuk Negara, hal ini merupakan justifikasi yang akhirnya dikeluarkan para praktisi hubungan internasional.<sup>14</sup> Tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah inti dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai kepentingan Negara untuk melindungi territorial dan kedaulatan Negeranya. Jika menggunakan pendekatan realisme akan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan Negara sebagai *unitary aktor* yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari Negara tersebut.<sup>15</sup>

Menurut H.J.Morgenthau kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan konsep umum konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (*general welfare*) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri yang mana adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Dengan kata lain hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Coulombis, Theodore A dan Wolfe, James. "Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power", Putra Abardin, Jakarta, 1999, hlm 107.

<sup>15</sup> Alexius Jemadu. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal 67-68.

<sup>16</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, Alfred A. Knopf, New York, 1978, hlm 4-15.

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Maka dalam penelitian ini, dapat juga dipahami dengan menganalisa Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*).

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri. Ia merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional.

Dari berbagai konsep tentang kepentingan nasional diatas dapatlah di petakan menjadi beberapa dimensi. Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi menjadi beberapa bagian.

Bagian pertama, kepentingan ekonomi, kedua, kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan terakhir adalah ideologi. Ketiga dimensi ini merupakan aspek-aspek utama yang memengaruhi dan memotivasi sebuah negara dalam mengusahakan kepentingan nasional negara masing-masing dalam hubungan internasional.<sup>17</sup>

*Pertama, kepentingan ekonomi.* Kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu kepentingan yang dianggap mendasar, karena biasanya, kualitas baik atau buruknya perekonomian suatu negara, akan memengaruhi kehidupan negara tersebut secara keseluruhan. Kerjasama Iran-Suriah dalam bidang ekonomi sudah

---

<sup>17</sup> Daniel S Paap, *Op. Cit.* hlm.43

lama berlangsung selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mereka juga berinteraksi dalam kegiatan ekspor impor. Baru-baru ini kedua Negara menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi yang baru terutama dalam bidang ketersediaan tenaga listrik yang mana kita ketahui bahwasannya Iran telah mengembangkan teknologi nuklir mereka untuk kebutuhan listrik dan hal ini juga direspon positif oleh pemerintah Suriah dengan mengekspor pasokan listrik dari Iran<sup>18</sup>.

*Kedua adalah kepentingan pertahanan dan keamanan.* Kepentingan pertahanan dan keamanan bertujuan untuk dapat melindungi suatu negara beserta seluruh rakyatnya dari ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam negara bersangkutan. Kualitas pertahanan dan keamanan suatu negara lantas seringkali dianggap erat kaitannya dengan kualitas badan dan kekuatan armada militer suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kuat atau lemahnya suatu negara, selain ditinjau dari segi ekonomi, juga sangat dipengaruhi oleh kualitas badan militer negara. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya Iran merupakan Negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, dari segi persenjataan maupun sumberdaya militer mereka sangatlah ditakuti. Tetapi kekuatan tersebut belumlah cukup rasanya untuk membuat mereka bertahan apabila terjadi konflik yang melibatkan beberapa Negara sekaligus, sehingga sangatlah wajar apabila Iran yang sudah sejak lama menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan Suriah ingin tetap berada dalam satu kubu, terutama dalam menjaga keutuhan teritorial Negara mereka.

*Ketiga adalah kepentingan ideologi.* Ideologi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah sistem atas ide-ide yang ideal, yang memberikan arah dan tujuan

---

<sup>18</sup>Iran Mulai Kirim Listrik ke Suriah dan Lebanon, dalam <http://islamtimes.org/vdcbg8b8srhb00p.qnur.html>, diakses pada 21 Januari 2012.

untuk kelangsungan hidup. Kepentingan ideologi adalah kepentingan yang bertujuan untuk dapat melindungi dan mempertahankan ideologi suatu negara dari pengaruh ideologi bangsa lain. Namun, ada negara-negara tertentu yang mengombinasikan ideologinya dengan ideologi dari negara lain. Seringkali yang terjadi adalah negara-negara tersebut menyaring dan mempertimbangkan dampak positif dari ideologi negara asing, sehingga menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi negara tersebut. Betapa kepentingan ideologi menjadi salah satu dimensi atau motivasi yang esensial dalam kepentingan nasional dapat dilihat dari interaksi negara-negara dunia khususnya Eropa pada masa perang dunia pertama dan kedua. Salah satu penyebab utama meletusnya perang dunia tersebut, selain untuk memperluas daerah kekuasaan, adalah karena adanya perbedaan ideologi antara blok Barat dan blok Timur, ideologi komunis dan liberalis. Perang dunia pertama dan kedua dapat dijadikan pelajaran dan wawasan mengenai pentingnya sebuah ideologi suatu negara dalam kepentingan nasional.

Setelah perang dunia pertama dan kedua berakhir terjadi pemetaan politik dunia dimana Negara-negara pemenang menjadi sentral dari segala kegiatan politik dunia, hal ini membuat keadaan Negara-negara yang memiliki ideologi bertentangan atau berlainan dengan Negara-negara barat merasa semakin terdiskriminasi bahkan tertindas, terutama Negara-negara berideologi Islam. Iran yang berideologi Islam syiah merasa perlu menjaga keutuhan ideologinya dengan membentuk kerjasama dengan Negara lain yang memiliki ideologi sama yaitu Suriah, meskipun di Suriah kaum Syiah adalah minoritas tetapi mereka dalam posisi sentral pemegang pemerintahan. Sehingga Iran merasa sangatlah penting menjaga keberadaan pemerintahan tersebut di Suriah.

## 2. Ashabiyah

Setiap Negara di kawasan Timur Tengah memiliki kesetiaan masing-masing terhadap sesuatu yang mereka anggap penting dalam kehidupan mereka. Bentuk Kesetiaan yang ada di Timur Tengah dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, diantaranya: Ashabiyah, Wathanniyah, Qaummiyah dan Ummah.<sup>19</sup>

*Ashabiyah* secara luas dapat diartikan sebagai sebuah faham yang lebih mengutamakan kesetiaan pada keluarga tertentu atau faham tertentu. *Wathanniyah* adalah faham kesetiaan yang lebih mengutamakan Negara bangsa dari pada yang lainnya. *Qaummiyah* adalah faham yang mengutamakan kesetiaan pada suku tertentu dan *Ummah* adalah faham yang lebih mengutamakan kesetiaan pada suatu agama tanpa membedakan keluarga, suku maupun Negara bangsa.<sup>20</sup>

Apabila kita kaitkan dengan kebijakan Iran tentang dukungannya terhadap pemerintahan Bashar al Assad dapatlah di jelaskan bahwa dukungan ini didasari oleh teori kesetiaan Ashabiyah. Iran adalah Negara yang mayoritas masyarakat dan pemerintahnya berideologikan Islam Syi'ah, tetapi tidak demikian dengan mayoritas warga Negara Suriah yang menganut ideologi Islam Sunni, namun pemerintahnya justru dipegang kaum minoritas pimpinan Bashar al Assad yang menganut ideologi Syi'ah.

Syi'ah menurut bahasa berarti pengikut dan penolong, dan diucapkan untuk sekelompok manusia yang bersatu/berkumpul dalam satu masalah, dan kepada setiap orang yang menolong seseorang dan berhimpun membentuk suatu kelompok padanya. Kemudian kata ini dipergunakan untuk kelompok yang menolong dan membantu

---

<sup>19</sup> Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Maharsa, Yogyakarta, 2014. Hlm. 83

<sup>20</sup> Ibid, hlm 83-92.

khalifah 'Ali dan keluarganya, lalu menjadi nama khusus bagi kelompok ini.<sup>21</sup> Menurut Asy-Syihristaniy, Syi'ah adalah kelompok yang mengikuti Khalifah 'Ali dan menyatakan kepemimpinannya baik secara nash ataupun wasiat yang adakalanya secara jelas ataupun samar, dan mereka berkeyakinan bahwa kepemimpinan (Imamah) tidak keluar dari anak-anaknya, dan jika keluar darinya maka itu terjadi secara zalim atau sebab taqiyah darinya.<sup>22</sup>

Jenis Syi'ah berdasarkan sektenya bermacam-macam, ada imam duabelas, Ismailiyah dan Zaidiyah. Iran bersekte imam ke duabelas sedangkan Suriah bersekte Zaidiyah. Iran memiliki sekte Syi'ah yang berbeda dengan Suriah namun mereka tetap mendukung pemerintahan Bashar al Assad di Suriah salah satu faktornya itu karena faham kesetiaan Ashabiyah.

#### **D. Hipotesis**

Dukungan Iran terhadap pemerintahan Suriah didasari atas kepentingan nasional negara Iran yang diwujudkan kedalam kebijakan politik luar negeri. Dasar kepentingan nasional Iran terhadap Suriah dipetakan dalam bidang,

1. Ekonomi, yang berupa perjanjian-perjanjian dan kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam hal penanaman modal, infrastruktur, migas, teknologi dan sumber daya manusia, sehingga menghasilkan saling ketergantungan guna keberlangsungan roda perekonomian Negara masing-masing.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 44-45

<sup>22</sup>[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkumpulan.googlecode.com%2Ffiles%2FFZEAliran%2520Islam.pdf&ei=r\\_IGU7aoKcin8AWPrYL4Cg&usq=AFOjCNG7-PZsiC-v2Tg70riK1DFjWnB1Tg&bvm=bv.64367178,bs.1,d.dGe](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkumpulan.googlecode.com%2Ffiles%2FFZEAliran%2520Islam.pdf&ei=r_IGU7aoKcin8AWPrYL4Cg&usq=AFOjCNG7-PZsiC-v2Tg70riK1DFjWnB1Tg&bvm=bv.64367178,bs.1,d.dGe), diakses pada 5 april 2014.



2. Ketahanan dan keamanan, sebagai rekan dan sahabat lama Suriah berperan sangat penting dalam memelihara wilayah Iran, menjaga keselamatan warga Negara Iran, menjaga area militer yang penting, baik jalur distribusi maupun markas militer, melindungi sumber-sumber kekuatan Negara dan menjaga serta mengantisipasi serangan dari musuh.

3. Ideologi, paham ideologi syi'ah menjadi kekuatan Iran paska revolusi Iran tahun 1979. Melindungi dan memelihara pola hidup, sistem politik, hukum, budaya serta nilai-nilai moral kehidupan yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masarakat. Faham Ashabiyah kemudian yang menjadi dasar keputusan Iran membantu Suriah, dimana kedua Negara memiliki jenis aliran yang berbeda dalam Syi'ah.

#### **E. Batasan Penelitian**

Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan nasional Negara Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah dimulai dari peristiwa Arab Spring (2010) hingga sanksi yang dikeluarkan oleh PBB terhadap Suriah (2013).

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran akan sebab musabab negara Iran yang secara historis pemerintahannya jelas menentang pemerintahan yang otoriter tetapi memiliki sikap yang berbeda dalam menanggapi kasus yang terjadi pada pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah dan cenderung mendukung kebijakan pemerintahannya terutama dalam pengambilan kebijakan mengatasi gejolak yang terjadi di dalam negeri dan para demonstran. Gambaran ini diwujudkan dalam

Kepentingan Nasional yang menjadi landasan pengambilan sikap terhadap Suriah pimpinan Bashar Al Assad. Selain itu, penulis juga mencoba menggunakan konsep atau teori "Kepentingan nasional" oleh Daniel .S. Papp dalam menganalisa keputusan Iran mendukung Suriah.

### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Manfaat penelitian Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teoritis dan mempertegas wawasan berfikir. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan baik dan menggunakan kerangka dan metode kepustakaan akan menambah pengetahuan teoritis maupun memperkaya wawasan dalam mengkaji sebuah kasus pengambilan sikap sebuah Negara serta menambah pengalaman penulis menyikapinya dari sebuah sudut pandang.

#### Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan diukur, dibandingkan dan dianalisis, serta akan dapat memberikan dampak bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus terhadap ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu.

### **H. Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul dan bentuk pertanyaan yang digunakan maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana dalam skripsi ini hanya ada satu variabel yang akan diteliti, sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi

kepuustakaan dimana hampir semua bahan yang digunakan berasal dari buku, jurnal dan sumber lainnya berasal dari koran, *website*, dan sumber laporan lainnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada bab I, merupakan bagian yang berisi mengenai latar belakang permasalahan serta pokok permasalahan yang akan dibahas, selain itu juga merumuskan beberapa hal pokok antara lain, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini. Selanjutna pada bab II, akan dibahas tentang sejarah Negara Iran, terbentuknya Negara Republik Islam Iran melalui revolusi hingga politik luar negeri Iran paska revolusi Islam, dan posisi yang diambil Iran dalam menyikapi fenomena “Arab Spring” yang terjadi di Negara-negara Arab, Timur Tengah dan sebagian Afrika. Kemudian pada bab III, penulis akan menceritakan tentang konflik yang terjadi di Negara Suriah pada masa pemerintahan Bashar Al Assad, lalu menjelaskan sejarah hubungan kedua Negara hingga pro dan kontra oleh Negara-negara lain atau lembaga internasional termasuk sanksi dari PBB terhadap Suriah, kemudian sikap yang diambil oleh Iran dan Negara yang mendukung atau Negara-negara yang menentang pemerintahan Bashar al Assad. Pada bab IV akan menganalisis apa yang menjadi penyebab dukungan Iran terhadap Suriah ketika terjadi konflik, yang kemudian melahirkan sikap standard ganda dimana kepentingan Nasional di bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta ideologi Islam Syi’ah membuat Iran mengambil keputusan mendukung pemerintahan otoriter Bashar al Assad. Terakhir adalah bab V, bagian ini menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh yang dijadikan sebagai jawaban yang menjadi pokok permasalahan.